Addatuang Sawitto (1942-1960)

Fuji Indira¹, Mustari Bosra², Najamuddin³

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

¹Email: fujiindira@gmail.com

Abstrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi *Addatuang Sawitto* pada masa sebelum kemerdekaan tahun 1942 hingga 1945 hanya sebagai simbol sebab perannya dalam pemerintahan diambil alih oleh Jepang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda para raja di Sulawesi Selatan terkhusus di Kerajaan Sawitto telah ditundukkan pada perjanjian pendek atau *Korte Veklaring*. Kemudian pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949 *Addatuang Sawitto* mengatakan tunduk dan berada dibelakang NKRI tetapi setelah Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan NICA nya kekuasaan para bangsawan atau raja dikembalikan untuk kepentingan Belanda dalam mengambil hati rakyat. Sedangkan pasca revolusi kemerdekaan tahun 1950 hingga 1960 setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan dihapusnya negara-negara boneka termasuk NIT dan kembali menjadi NKRI sistem pemerintahan diubah, dimana sistem pemerintahan Kerajaan Sawitto dihapuskan dan digantikan menjadi Daerah Tingkat II Pinrang. Pada masa ini *Addatuang Sawitto* mendapat kehormatan untuk memimpin Daerah Tingkat II Pinrang dengan diangkatnya putra mahkota atau pewaris tahta Kerajaan Sawitto. Adapun yang diangkat menjadi kepala daerah adalah Andi Makkulawu yang merupakan suami *Addatuang Sawitto We Rukiyah*. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan Kerajaan Sawitto dan diganti menjadi Daerah Tingkat II Pinrang yang kemudian menjadi Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci: Addatuang Sawitto, peran, fungsi

Abstract. The results show that the role and function of *Addatuang Sawitto* before independence from 1942 to 1945 was only a symbol because his role in government was taken over by Japan. During the reign of the Dutch East Indies, the kings in South Sulawesi, especially in the Kingdom of Sawitto, were subjected to a short agreement or *Korte Veklaring*. Then during the independence revolution from 1945 to 1949 *Addatuang Sawitto* said he was submissive and was behind the Republic of Indonesia, but after the Dutch returned to Indonesia with NICA, the power of the aristocrats or kings was returned to the interests of the Netherlands in winning the hearts of the people. Meanwhile, after the independence revolution in 1950 to 1960 after the Dutch recognized Indonesian sovereignty and the elimination of puppet states including NIT and returned to the Republic of Indonesia, the government system was changed, where the system of government of the Kingdom of Sawitto was abolished and replaced by the Pinrang Level II Region. At the time, *Addatuang Sawitto* had the honor to lead the Pinrang Level II Region by appointing the crown prince or heir to the throne of the Kingdom of Sawitto. The one who was appointed as regional head was Andi Makkulawu who was the husband of *Addatuang Sawitto We Rukiyah*. Thus, the reign of the Kingdom of Sawitto ended and was changed to the Pinrang Level II Region which later became the Pinrang Regency.

Keywords: Addatuang Sawitto, role, function

Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Sulawesi Selatan, terdapat banyak kerajaan yang tersebar di hampir semua kawasan di Sulawesi Selatan. Namun, hanya beberapa kerajaan yang mencolok dan sering ditulis oleh para sejarawan. Adapun kerajaan tersebut adalah Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Meskipun kedua kerajaan ini adalah kerajaan yang pernah memegang pengaruh yang sangat penting dikalangan masyarakat Bugis-Makassar. Terdapat banyak kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang jumlahnya kurang lebih sekitar 50 kerajaan besar maupun kecil yang mewarnai sejarah di zamannya, bukan hanya Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Adapun beberapa kerajaan tersebut adalah Kerajaan Tallo, Kerajaan Luwu, Kerajaan Massenrempulu', Kerajaan Galesong, Kerajaan Bangkala, Kerajaan Siang, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Suppa, Kerajaan Mallusetasi', Kerajaan Rappang, Kerajaan Sawitto (Purnamai, 2014: 10).

Di daerah Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa kerajaan yang cukup berpengaruh. Salah satu kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sawitto. Kerajaan Sawitto adalah salah satu kerajaan yang tergabung dalam *LimaE' Ajatappareng* yang termasuk didalamnya Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Suppa, Kerajaan Alitta dan Kerajaan Rappang (Abd. Latif, 2012: 52). Kelima kerajaan itu membentuk persatuan atau perjanjian kerjasama. Dalam istilah bahasa Bugis, *LimaE' Ajatappareng* terdiri atas sejumlah suku kata, yaitu *lima* (Lima), *aja* (Barat), dan *tappareng* (Danau) (Muhammad Amir; Masgaba; & Syahrir Kila, 2019: 71). Jadi pengertian dari *LimaE' Ajatappareng* adalah persekutuan lima kerajaan yang terletak di sebelah barat danau (Danau Tempe, Danau Sidenreng dan Danau Buaya) (Muhammad Amir, 2013: 39-40). Raja-raja di Kerajaan *LimaE' Ajatappareng* memiliki gelar yang beragam. Di Suppa, raja bergelar *Datu*, di Rappang dan Alitta bergelar *Arung*, sedangkan di Sidenreng dan Sawitto bergelar *Addatuang* (Muhammad Abduh; dkk, 1985: 126).

Sawitto juga merupakan salah satu kerajaan di wilayah *Ajatappareng* yang terletak di pesisir pantai bagian utara jazirah selatan Sulawesi yang menghadap ke Selat Makassar.

Kerajaan ini berbatasan dengan wilayah Tanah Toraja dan Massenrempulu (Kerajaan Duri, Kassa dan Batulappa) di sebelah utara, Kerajaan Rappang, Kerajaan Alitta dan Kerajaan Massenrempulu (Kerajaan Maiwa dan Enrekang) di sebelah timur, Kerajaan Suppa dan Kerajaan Alitta di sebelah selatan, dan Selat Makassar dan Kerajaan Binuang-Mandar di sebelah barat. Luas kerajaan ini diperkirakan kurang lebih 200 *paal* (1 *paal* = 1.506 m) persegi (Morris, 1890 : 193-194).

Pada zaman sebelum berdirinya Kerajaan Sawitto, terdapat beberapa kelompok manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang kacau. Kelompok-kelompok tersebut saling menyerang dan membunuh, yang dalam tradisi Epos I la Galigo disebut keadaan hidup bagaikan "*Sianre Balei TauE*" (saling memangsa seperti ikan) (Pananrangi Hamid, 1991: 32-61) atau dalam bahasa asing disebut "*Homo Homini Lupus*". Oleh karena itu, dalam keadaan atau kondisi seperti itu, ditemukan suatu konsepsi kepemimpinan yang unggul dan dapat mencapai tujuan terbentuknya negeri yang besar dan kuat, penuh perdamaian, kemauran dan kesejahteraan. Konsep itu menurut tradisi lisan disebut *To Manurung* (Bugis) dan *Tu Mananurung* (Makassar) yang diartikan sebagai orang yang turun dari dunia atas (Mattulada, 1998: 26). Dalam sumber-sumber Lontara' diceritakan bahwa hanya *To Manurung* yang dapat atau mampu mendamaikan konflik-konflik yang terjadi saat masa "*Sianre Balei TauE*". Itulah sebabnya *To Manurung* dianggap sebagai peletak dasar pembentukan kerajaan yang kemudian diangkat menjadi raja pertama (Muhammad Amir; Syahrir Kila; Rosdianah Hafid, 2012: 26).

Sama halnya dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, raja pertama di Kerajaan Sawitto adalah *To Manurung*. Ada dua perspektif mengenai raja pertama di Kerajaan Sawitto. Perspektif pertama mengatakan bahwa *To Manurung* atau raja pertama Sawitto muncul di Akkajangnge atau Lurah MarajaE. Kehadiran *To Manurung* tujuh bersaudara adalah seorang perempuan yang bergelar "*Puang Risompe*" beserta keenam saudara laki-lakinya yang menjadi pejabat pemerintah Sawitto, yakni sebagai *Anang*, *Anreguru*, *Pangngulu Lompo*,

Pabbicara dan *Salewatang* (Johan Nyompa, 1979).

Perspektif kedua mengatakan bahwa raja pertama di Kerajaan Sawitto adalah *To Manurung* dari Bacukiki (sekarang Pare-pare) yang bernama La Bangenge. La Bangenge memperisterikan We Tepu Linge Manurung ri Akkajeng yang muncul di *Lawarangparang*, suatu tempat di Suppa. We Tepu Linge merupakan *Datu Suppa* yang pertama (Muhammad Amir, 2013: 39-40) dan juga menjadi *Arung Rappang* pertama.

Dari hasil pernikahan keduanya memiliki tiga orang anak, dua orang laki-laki yang bernama La Teddungalompo dan La Bottinglangi, serta satu orang perempuan yang bernama We Pawawoi. La Teddungalompo kemudian menggantikan La Bacukiki sebagai *Addaoang Sawitto* sekaligus menjadi *Datu Suppa* menggantikan We Tepulinge. Jadi, La Teddungalompo merangkap dua jabatan yaitu sebagai *Addaoang Sawitto* dan *Datu Suppa* (Abd. Latif, 2012: 70).

Mengenai perbedaan pendapat dari kedua perspektif tersebut tentang raja pertama dari Kerajaan Sawitto kemudian terdapat persamaan pada raja ke empat, bahwa raja keempat bernama La Paleteangnge. Beliau diberi gelar *Addaoang ri Sompae* (raja yang disembah) di Sawitto. Pada masa pemerintahan La Paleteangnge, Kerajaan Sawitto melakukan suatu hubungan kerja sama dengan Kerajaan Suppa, Kerajaan Rappang, Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Alitta. Hubungan kerja sama ini dikenal dengan sebutan "*LimaE Ajatappareng*" (Syahrir Kila, 1997: 116-117).

Pada masa pemerintahan *Addaoang* ke IV ini, Kerajaan Sawitto juga mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan dan perkembangan yang terjadi di Kerajaan Sawitto membuat kerajaan-kerajaan lain ingin menguasainya. Hal ini di karenakan daerah ini memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk daerah pertanian terutama beras (Arfah, et al., 1998: 38).

Memasuki periode pemerintahan We Pasulle raja ke-IX gelar raja, dalam hal ini *Addaoang* berubah menjadi *Addatuang* dan pada saat ini pula agama Islam diterima di Kerajaan Sawitto pada tahun 1608 Masehi atau sekitar abad XVII (Suriadi Mappangara, 2012: 85). Masyarakat Sawitto menyebut pemimpin atau rajanya sebagai *Addatuang/Addaoang*, bagi masyarakat Sawitto sendiri *Addatuang/Addaoang* diartikan sebagai simbol

persatuan, raja tempat memeluk atau raja sebagai tempat perlindungan bagi rakyatnya (Suriadi Mappangara, 2007: 9). Sebelum masuknya Islam di Kerajaan Sawitto, pemimpin atau raja diberi gelar *Addaoang*. Namun setelah diterimanya Islam sebagai agama di Kerajaan Sawitto gelar pemimpin atau raja di Kerajaan Sawitto menggunakan gelar *Addatuang*.

Addaoang secara harfiah bermakna benda tempat berlindung atau tempat berpeluk (Abd. Latif, 2014: xii), *Addaoang* merupakan tempat berlindung orang banyak, yang diumpamakan sebagai kayu tempat rakyat berlindung atau berpeluk (Lontarak Akkarungang Sidenreng, 3-4) sedangkan *Addatuang* merupakan gelar pengganti untuk datuk atau Dato yang artinya pemimpin atau penguasa. Jadi, *Addatuang* adalah sesepu atau pemimpin negeri dalam suatu kerajaan (Suriadi Mappangara, 2007: 9). Dalam pengangkatan dan pelantikan *Addatuang* ditetapkan syarat-syarat: keturunan bangsawan Sawitto, memiliki sifat dan watak ksatria, jujur dan bijaksana, memiliki keterampilan dalam memimpin serta tidak catat jasmani dan rohani (Muhammad Arfah; dkk, 1996: 34-35). Sebenarnya antara *Addatuang* dan *Addaoang* tidak ada perbedaan, keduanya merupakan gelar bagi raja di Kerajaan Sawitto (H. Bur Pabitjara, 18 November 2019).

Raja atau dalam hal ini *Addatuang* mulai tergeser posisinya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1906 hingga 1942 merupakan masa pemerintahan dan kekuasaan Belanda yang seutuhnya dan menyeluruh. Penguasaan wilayah, khususnya di Sulawesi ini dicapai setelah dilancarkan pengiriman pasukan pendudukan (*militaire expeditie*) Sulawesi pada tahun 1905, untuk memaksa penguasa-penguasa di wilayah Sulawesi Selatan untuk tunduk, patuh dan menyerahkan kekuasaan kepada Hindia Belanda, melalui penandatanganan Perjanjian Pendek (*Korte Verklaring*) yang di sodorkan. Isi Perjanjian Pendek memuat tiga pokok, yaitu kesediaan menyerahkan kekuasaannya, dan menjadi bawahan pemerintah Hindia Belanda, patuh dan taat pada peraturan dan pemerintahan pemerintah Hindia Belanda dan bersedia meniadakan kekuatan militernya (Edward L. Poelinggomang, 2004: 2). Hal tersebut telah merubah bentuk-bentuk pemerintahan semula yang awalnya berupa kerajaan atau konfederasi yang merupakan bentuk pemerintahan penguasa lokal tersebut dihapuskan. Raja hanya menjadi

simbol, dan yang menjalankan pemerintahan secara langsung adalah pemerintah Hindia Belanda (Edward L. Poelinggomang, 2004: 2). Dalam pemerintahan ini pemerintah Hindia Belanda menjalankan pemerintahan pusat, sedangkan raja tetap menjalankan pemerintahan adat. Raja memiliki fungsi sebagai simbol dari kerajaan dan tetap berperan dalam pemerintahan adat, hanya saja kekuasaannya tidak sekuat sebelum masuknya pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1941 hingga 1942, Belanda di serang dan dikalahkan oleh Jepang. Setelah itu masuklah Jepang mengambil alih Indonesia dari Belanda dan memerintah di Indonesia termasuk di Sawitto. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda tidak di ubah dan masih diterapkan hanya saja nama atau sebutannya yang diganti dengan istilah Jepang. Namun pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah Kota Nagasaki dan Hiroshima di bom atom. Selanjutnya 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mengumumkan keseluruhan dunia tentang kemerdekaannya. Namun pengumuman tersebut tidak diakui oleh pihak Belanda, sebab Belanda masih ingin menjajah Indonesia. Belanda kembali masuk ke Indonesia dan sekitar tahun 1948 hingga 1949 Belanda mendirikan Negara didalam negara Indonesia yaitu Negara Indonesia Timur. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Belanda yang bernama Yuliana akhirnya menyerahkan kemerdekaan Indonesia (Lontarak Akkarungeng Sawitto, 141).

Pada tahun 1960 terjadi perubahan besar di Indonesia dalam bidang pemerintahan. Dimana Pare-pare dirubah menjadi lima kabupaten, Sehingga Kewedanan Pinrang yang awalnya berada di bawah Pare-pare berubah menjadi Kabupaten Pinrang. Pinrang terdiri dari tujuh wilayah, masing-masing wilayah disebut kecamatan. Pinrang memiliki seorang kepala daerah yang disebut Bupati yang bernama Andi Makkulawu Cakkuridi Wajo. Sejak saat itu sistem pemerintahan kerajaan dihapuskan. Berakhirlah kekuasaan Kerajaan di Sawitto, hanya tinggal nama saja dan berubah menjadi Kecamatan Watang Sawitto dan Desa Watang Sawitto yang wilayahnya semakin kecil/sempit (Lontarak Sawitto: 142-143).

Status *Addatuang Sawitto* yang pada awalnya merupakan pemimpin di Kerajaan Sawitto (sekarang Kabupaten Pinrang) mulai memudar seiring berjalannya waktu. Yang

dulunya wilayah ini dipimpin oleh seorang *Addatuang*, perlahan digantikan oleh seorang Bupati yang menjadi pemimpin atau kepala daerah di wilayah ini. *Addatuang* masih ada, hanya saja posisinya yang berubah, bukan lagi menjadi seorang pemimpin di daerah ini tetapi menjadi pemangku adat.

Hingga saat ini, susunan majelis Adat *Addatuang* masih berjalan di daerah Kabupaten Pinrang. Adapun pemimpin Adat *Addatuang Sawitto* yaitu Andi Bau Sawerigading yang diangkat sebagai *Addatuang Sawitto* ke XXVI di Pinrang pada tanggal 20 Juli 2015. Beliau merupakan anak dari *Addatuang* ke XXV yang bernama We Rukiah Karaeng Tinggi yang diperistrikan oleh Datu Makkulawu yang merupakan Bupati pertama Kabupaten Pinrang (A. Bau Sawerigading, 18 Juli 2019).

Addatuang Sawitto menarik untuk dikaji berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi mulai dari sebelum kemerdekaan, masa revolusi kemerdekaan hingga pasca revolusi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut sangat berdampak di Kerajaan Sawitto. Berdasarkan peristiwa tersebut akan dilihat bagaimana peran dan fungsi *Addatuang Sawitto* di setiap masa.

Kerajaan Sawitto tetap hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang dulunya merupakan kerajaan kini menjadi cagar budaya atau peninggalan masa lampau. *Addatuang Sawitto* merupakan raja atau pemimpin di daerah Kerajaan Sawitto atau yang sekarang menjadi daerah Kabupaten Pinrang. Namun setelah masuknya bangsa penjajah ke Nusantara posisi dari *Addatuang* ini mulai memudar, hingga setelah kemerdekaan sistem kerajaan bahkan dihapuskan dan *Addatuang* kemudian digantikan oleh bupati. *Addatuang* bukan lagi sebagai pemimpin di wilayah ini, tetapi menjadi pemangku adat. Adanya perubahan tersebut maka perlu dikaji tentang *Addatuang Sawitto* (1942-1960).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintahan

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Penambahan awalan “pe” menjadi pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Penambahan akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari pada badan yang memerintah tersebut (Inu Kencana Syafie, 2003: 3).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintahan adalah proses, cara atau perbuatan memerintah. Dalam melakukan pemerintahan berarti ada badan atau orang (pemerintah) yang memerintah. Badan atau orang yang melakukan pemerintahan biasanya adalah seorang pemimpin dalam suatu wilayah, misalnya presiden atau raja. Sebelum sistem pemerintahan menggunakan presiden sebagai pemerintah atau pemimpin, jauh sebelum itu sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan kerajaan. Hingga saat ini masih ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan kerajaan.

Sistem kerajaan merupakan jenis pemerintahan dimana raja menjadi kepala negara atau pemimpin tertinggi. Bagi sebagian besar negara di dunia, penguasa raja merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan sebuah negara. Pada umumnya, seorang raja pada sistem kerajaan di masa lalu memiliki kekuasaan yang absolut dan tidak boleh dibantah oleh siapapun. Sistem pemerintahan kerajaan mengizinkan seseorang untuk berkuasa seumur hidupnya. Raja diangkat atau dinobatkan secara turun temurun dengan memilih putera/puteri tertua (atau sesuai dengan budaya setempat) dari istri yang sah (permaisuri) (Inu Kencana Syafii, 2001: 85).

To Manurung dalam konsep kepemimpinan dianggap manusia setengah dewa menjelma di muka bumi untuk menentramkan masyarakat dalam setiap kelompok kaum, juga disebut-sebut sebagai awal pemerintahan baru yang melahirkan konsep kenegaraan. Konsepsi kepemimpinan *To Manurung* juga disusun oleh terbentuknya konsepsi kenegaraan dengan wilayah teritorial yang lebih luas dan meliputi sejumlah kelompok kaum yang mengikat perdamaian dan menyepakati menerima kepemimpinan *To Manurung* menjadi pemimpin tertinggi untuk mereka (Mattulada, 1998: 27). Sama halnya dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, raja pertama di Kerajaan Sawitto adalah *To Manurung*. *To Manurung* dianggap sebagai raja pertama atau *Addaoang* (*Addatuang*) pertama Kerajaan Sawitto.

Setelah datangnya *To Manurung* di Kerajaan Sawitto, terjadi perubahan dari pemerintahan yang lalim (tidak menaruh belas kasihan) berubah menjadi pemerintahan yang demokrasi. Dalam pemerintahan *To Manurung* tidak mengenal monarki absolut sebab diangkatnya pembantu raja dalam menjalankan pemerintahan di Kerajaan Sawitto. Pada masa

ini masyarakat Sawitto masih menganut kepercayaan leluhur yang menganggap raja atau *Addaoang* adalah seorang keturunan *To Manurung* yang di utus ke bumi untuk memerintah. Apa yang dikatakan *Addaoang* itulah yang dianggap hukum oleh masyarakat, dan harus ditaati oleh rakyat. Yang berhak menggantikan *Addaoang/Addatuang* atau raja adalah keturunannya sendiri (Muhammad Arfah; dkk, 1996: 33-34).

B. Konsep Addatuang

Addatuang adalah tokoh utama dalam suatu kerajaan atau sama dengan raja. *Addatuang* adalah gelaran bagi raja-raja Sawitto. Sebelum masuknya Islam di Kerajaan Sawitto masih menggunakan istilah *Addaoang*, setelah masuknya agama Islam di Kerajaan Sawitto pada masa pemerintahan We Passulle raja ke 9 sekitar tahun 1608 Masehi, gelar *Addaoang* di ganti menjadi *Addatuang*.

Addaoang secara harfiah bermakna benda tempat berlindung atau tempat berpeluk (Abd. Latif, 2014: xii), *Addaoang* merupakan tempat berlindung orang banyak, yang diumpamakan sebagai kayu tempat rakyat berlindung atau berpeluk (Lontarak Akkarungang Sidenreng, 3-4) sedangkan *Addatuang* merupakan gelar pengganti untuk *datu* yang artinya pemimpin atau penguasa. *Addatuang* adalah sesepu atau pemimpin negeri dalam suatu kerajaan (Mappangara, 2007: 9).

Addatuang adalah seorang raja yang merupakan kepala pemerintahan. Dalam pengangkatan dan pelantikan *Addatuang* ditetapkan syarat-syarat: keturunan bangsawan Sawitto, memiliki sifat dan watak ksatria, jujur dan bijaksana, memiliki keterampilan dalam memimpin serta tidak catat jasmani dan rohani (Muhammad Arfah; dkk, 1996: 34-35). Sebenarnya antara *Addatuang* dan *Addaoang* tidak ada perbedaan, keduanya merupakan gelar bagi raja di Kerajaan Sawitto (H. Bur Pabitjara, 18 November 2019).

C. Deskripsi Teori

Garis besar penelitian ini adalah sejarah lokal di Kabupaten Pinrang, teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial dipilih dikarenakan dalam penelitian terjadi suatu perubahan, yang awalnya merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah dalam hal ini bupati. Untuk mengetahui lebih

mendalam mengenai teori ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berbicara tentang perubahan sosial, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum maupun sesudah jangka waktu tertentu. Konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan, antara lain: perbedaan, waktu yang berbeda dan diantara keadaan sosial yang sama (Sztompka, 2007: 3).

Setiap masyarakat tentunya mengalami perubahan dan dinamika sosial budaya. Perubahan dan dinamika sosial ini merupakan akibat dari adanya interaksi antarmanusia dan antarkelompok. Artinya, karena masyarakat selalu melakukan interaksi sosial maka sebuah perubahan sosial tidak bisa di hindari.

Perubahan sosial terjadi di wilayah Kerajaan Sawitto yang sekarang dikenal Kabupaten Pinrang. Pada mulanya di daerah ini masih menggunakan sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau dalam hal ini *Addatuang*. Namun seiring dengan berjalannya waktu kemudian sistem pemerintahan berubah menjadi kabupaten yang dipimpin oleh bupati, sehingga teori perubahan sosial ini sangat mendukung penelitian ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah atau jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analisis tentang *Addatuang Sawitto*. Penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah lokal.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat cara yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah tersebut. Hal ini sering disebut sebagai metode. Menurut Kenneth D. Bailey, metode adalah teknik penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian obyek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam untuk memperoleh suatu data yang mengandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti merangkum peran dan fungsi *addatuang Sawitto*. perihal teori yang digunakan untuk mengabstraksikan data yang telah dirangkum menjadi perhatian lebih peneliti, walaupun tidak secara utuh dijelaskan,

makna. Makna yang dimaksud merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2005:6).

Dalam melakukan penulisan sejarah, segala kegiatan yang kita lakukan pada umumnya hampir sama dengan semua metode penulisan ilmiah lain. Hanya saja ada beberapa prosedur khusus yang dilakukan dalam penulisan Sejarah. Hal ini dikarenakan metode historis mempunyai perbedaan yang khas dari kegiatan ilmiah lainnya. Perbedaannya terletak pada waktunya yang sulit untuk memahami masa lampau dan masa yang akan datang, untuk itu dalam menafsirkannya perlu kehati-hatian.

Dalam penggunaan metode penulisan sejarah harus memperhatikan beberapa aspek yang dijadikan landasan penulisan yaitu aspek permasalahan, ketersediaan sumber dan kerangka analitis. Metode dalam penulisan Sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber Sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis secara tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja yakni Heuristik yaitu menghimpun jejak-jejak masa lampau, Kritik yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya, Interpretasi merupakan penetapan makna dan saling hubungan dari pada fakta-fakta yang diperoleh itu dan penyajian atau penyampaian sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah sejarah atau yang sering di sebut dengan Historiografi (Natosusanto, 1971: 17).

Dengan demikian, untuk menyusun suatu kerangka penulisan sejarah, maka kisah sejarah harus disajikan secara kronologis (Reiner, 1997:75). Adapun yang dimaksud kronologis adalah fakta-fakta sejarah yang diperoleh disusun secara berurutan, terutama peristiwa yang telah terjadi. Penyusunan yang demikian, pada hakekatnya dapat member gambaran tentang keakuratan atau validitas fakta yang berkaitan dengan *Addatuang Sawitto*.

tetapi teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sawitto. Perihal teori perubahan sosial yang menjadi tumpuan mendasar dalam penelitian ini sepertinya cukup relevan digunakan untuk melihat perubahan sosial yang terjadi di daerah Sawitto. Daerah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sawitto

kini telah menjadi daerah Kabupaten Pinrang. Daerah yang dulunya dipimpin oleh seorang raja atau dalam hal ini *Addatuang* sekarang dipimpin oleh seorang kepala daerah atau bupati.

1. Peran dan Fungsi *Addatuang Sawitto*

Masa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1906 hingga 1942 merupakan masa pemerintahan dan kekuasaan Belanda yang seutuhnya dan menyeluruh. Penguasaan wilayah berhasil dicapai oleh pemerintah Hindia Belanda setelah melancarkan pengiriman pasukan pendudukan (*militaire expeditie*) Sulawesi tahun 1905, dengan tujuan untuk memaksa para penguasa di wilayah Sulawesi Selatan untuk tunduk, patuh dan menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Penyerahan kekuasaan dari para penguasa atau raja di Sulawesi Selatan kepada pemerintah Hindia Belanda ditandai dengan penandatanganan pernyataan pendek (*Korte Veklaring*).

Pemerintah Hindia Belanda akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan dengan penandatanganan pernyataan pendek (*Korte Veklaring*) termasuk Kerajaan Sawitto. Kekalahan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar serta ditandatanganinya *Korte Veklaring* membuka lembaran baru hubungan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar dengan pemerintah Hindia Belanda. Dengan kekalahan tersebut maka dimulailah campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam lembaga pemerintahan kerajaan, terjadi pemerintahan dualisme disatu pihak pejabat-pejabat adat dan agama berasal dari kelompok masyarakat setempat dan dipihak lain terdapat pejabat pemerintah Hindia Belanda yang bertugas untuk membantu dan mengawasi pejabat-pejabat adat dan agama (Najamuddin, 2015: 2). Dengan ditandatanganinya *Korte Veklaring* maka wilayah Kerajaan Sawitto menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Ketika Belanda berhasil menguasai Sulawesi Selatan, terkhusus Kerajaan Sawitto. Pada saat itu Kerajaan Sawitto berada di bawah pemerintahan *Addatuang La Tamma*. Namun, setelah ditandatanganinya *Korte Veklaring* daerah ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, sehingga *Addatuang* dan para aparatnya hanya merupakan pelaksana perintah Gubernur Jenderal (*Staat van Nedebeind*). Raja atau *Addatuang* hanya dijadikan sebagai simbol belaka untuk menaklukkan rakyat di Kerajaan Sawitto. Raja tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam wilayahnya, para raja

diakui sebagai kepala adat yang kemudian didampingi pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah *Onderafdeeling* Pinrang (Mattulada, 1974: 26). Masa pemerintahan Hindia Belanda, daerah daerah bawahan (*bate-bate*) tetap berlaku pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan lama atau adat, namun pada tingkat pemerintahan pusat berlaku sistem pemerintahan ala barat dengan sistem pemerintahan kolonialisme (Darwis Rasyid, 1985: 40-41).

Pemerintahan pemerintah Hindia terus berlanjut hingga masuknya Jepang ke Indonesia. Dengan ditandatanganinya kapitulasi Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak saat itu Indonesia secara resmi berada di bawah pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang tidak mengubah sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia terkhusus di Kerajaan Sawitto, raja atau *Addatuang Sawitto* hanya menjadi simbol kekuasaan Kerajaan Sawitto sebab yang menjalankan pemerintahan adalah pemerintah pendudukan Jepang. *Addatuang* masih menjalankan pemerintahan adat dan yang menjalankan pemerintahan pusat adalah pemerintah pendudukan Jepang. Selain *Addatuang*, dikenal pula istilah *Sulewatang Sawitto*. *Sulewatang Sawitto* yang sebenarnya memiliki arti sebagai pengganti *addatuang* dan bertugas untuk menyampaikan keputusan dan kehendak dari *addatuang*, namun ketika Kerajaan Sawitto dikuasai pemerintah Hindia Belanda *Sulewatan Sawitto* dijadikan sebagai pengganti kekuasaan *Addatuang*. Dengan kata lain *Sulewatn Sawitto* yang menjalankan pemerintahan di Kerajaan Sawitto, *Sulewatan Sawitto* diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut pun berlaku pada masa pendudukan Jepang dan yang diangkat sebagai *Sulewatan Sawitto* adalah La Tjalo.

Pendudukan Jepang berlangsung hingga tahun 1945, ketika Jepang dikalahkan Sekutu dalam Perang Dunia II. Kekalahan Jepang tersebut kemudian dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun pernyataan kemerdekaan tersebut tidak diterima oleh Belanda yang masih ingin kembali untuk menjajah Indonesia. Belanda berhasil menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia, hal tersebut dibuktikan pada 1948

sampai 1949 Belanda mendirikan negara didalam negara Indonesia yaitu Negara Indonesia Timur. Belanda berhasil menanamkan kembali pengaruhnya di Indonesia terkhusus di Kerajaan Sawitto dan kembali menerapkan sistem pemerintahannya.

Di Kerajaan Sawitto pemerintah Belanda mengangkat *Sulewatang* dengan kata lain *Sulewatang* inilah yang menjalankan pemerintahan dan *Addatuang Sawitto* hanya sebagai simbol. Kerajaan yang memiliki *sulewatang* pada masa Belanda, berarti kerajaan tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda, termasuk Kerajaan Sawitto (Ima Kesuma, 29 Maret 2021). Ketika Belanda kembali menguasai Sawitto yang diangkat menjadi *Sulewatang* adalah La Tjalo. Bahkan *Sulewatang* La Tjalo yang mewakili Kerajaan Sawitto dalam Konferensi Malino (Akkarungang Sawitto, 140).

Pada tanggal 24 Agustus sampai 3 November 1949, diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan muncullah RIS, sejak saat itu Negara Indonesia Timur melebur masuk kedalam RIS. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 tercapai kata sepakat untuk membubarkan RIS dan kembali menjadi NKRI yang diumumkan keseluruh pelosok tanah air Indonesia pada hari peringatan ulang tahun republik Indonesia ke-5 pada tanggal 17 Agustus 1950.

Ketika Indonesia kembali menjadi NKRI setelah dihapuskannya RIS dan negara-negara bonekanya. Kerajaan Sawitto masih berada di bawah kepemimpinan *Addatuang Sawitto* We Tenri hingga pada tahun 1951 beliau wafat dan dimakamkan di kompleks makan raja-raja Sawitto di Jl. Melati. *Addatuang Sawitto* We Tenri kemudian digantikan oleh kemanakannya (anak dari saudara perempuannya) yang bernama We Rukiyah. We Rukiyah Bau Baco Karaeng Ballatinggi mewarisi tahta di Kerajaan Sawitto. Beliau merupakan anak dari La Mappanyukki Datu Suppa dan Raja Bone dengan isterinya We Besse Petta I Bulu.

Addatuang Sawitto pada saat Indonesia merdeka telah mengatakan berada di belakang NKRI, dengan katalain kerajaan-kerajaan yang mengatakan berada dibelakang NKRI termasuk *Addatuang Sawitto* telah menyerahkan daerah kekuasaanya kepada NKRI. Berdasarkan pernyataan bahwa mereka tunduk terhadap NKRI maka kekuasaan raja hilang sebagai

penguasa. Kemudian setelah RIS dibubarkan maka dihapuskan pula pemerintahan kerajaan dan bergabung masuk ke dalam wilayah kekuasaan NKRI.

Pada masa pemerintahan *Addatuang Sawitto* We Rukiyah sistem pemerintahan kerajaan dihapuskan dan daerah Kerajaan Sawitto masuk ke dalam wilayah Daerah Tingkat II Pinrang, wilayah pemerintahan Kerajaan Sawitto mejadi Ibukota Daerah Tingkat II Pinrang. Karena pemerintahan Kerajaan Sawitto dihapuskan maka yang menjadi kepala daerah bukan lagi *Addatuang Sawitto*, tetapi diangkat seorang kepala daerah yang disebut bupati.

Para pewaris kerajaan yang kemudian diangkat menjadi pelaksana bupati yang ditunjuk oleh pemerintah, meskipun pada dasarnya bertolak belakang dengan pendidikan mereka. Para pewaris tahta yang diangkat menjadi bupati pertama dikarenakan secara psikologis masyarakat belum sepenuhnya lepas dari pengaruh kerajaan.

Di Kerajaan Sawitto sendiri yang diangkat menjadi bupati pertama ialah suami dari *Addatuang Sawitto* We Rukiyah yang bernama Andi Makkulawu. Meskipun demikian We Rukiyah tetap menjadi ratu atau *Addatuang Sawitto* tetapi hanya sebatas pemangku adat. *Addatuang Sawitto* tidak lagi memiliki fungsi tetapi berperan sebagai dewan adat di Kabupaten Pinrang.

Pembahasan

1. Peran dan Fungsi *Addatuang Sawitto* Sebelum Kemerdekaan

Sebelum pendudukan Jepang, Belanda lebih dahulu menguasai Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan dengan penandatanganan pernyataan pendek (*Korte Veklaring*) termasuk Kerajaan Sawitto. Kekalahan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar serta ditandatanganinya *Korte Veklaring* membuka lembaran baru hubungan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar dengan pemerintah Hindia Belanda. Dengan kekalahan tersebut maka dimulailah campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam lembaga pemerintahan kerajaan, terjadi pemerintahan dualisme disatu pihak pejabat-pejabat adat dan agama berasal dari kelompok masyarakat setempat dan dipihak lain terdapat pejabat pemerintah Hindia Belanda yang bertugas untuk membantu dan mengawasi pejabat-pejabat adat dan agama (Najamuddin, 2015: 2). Dengan

ditanda tanganinya *Korte Veklaring* maka wilayah Kerajaan Sawitto menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Ketika Belanda berhasil menguasai Sulawesi Selatan, terkhusus Kerajaan Sawitto. Pada saat itu Kerajaan Sawitto berada di bawah pemerintahan *Addatuang La Tamma*. Namun, setelah ditandatanganinya *Korte Veklaring* daerah ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, sehingga *Addatuang* dan para aparatnya hanya merupakan pelaksana perintah Gubernur Jenderal (*Staat van Nedebeind*). Raja atau *Addatuang* hanya dijadikan sebagai simbol belaka untuk menaklukkan rakyat di Kerajaan Sawitto. Raja tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam wilayahnya, para raja diakui sebagai kepala adat yang kemudian didampingi pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah *Onderafdeeling* Pinrang (Mattulada, 1974: 26). Masa pemerintahan Hindia Belanda, daerah daerah bawahan (*bate-bate*) tetap berlaku pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan lama atau adat, namun pada tingkat pemerintahan pusat berlaku sistem pemerintahan ala barat dengan sistem pemerintahan kolonialisme (Darwis Rasyid, 1985: 40-41).

Pemerintah Hindia Belanda sepenuhnya menduduki wilayah Sawitto hingga masuknya Pendudukan Jepang. Setelah Letnan Jenderal H. terpoorten menandatangani piagam penyerahan kekuasaan tanpa syarat (perjanjian Kalijati) kepada Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak saat itu Indonesia secara resmi berada di bawah pendudukan Jepang.

Jepang menduduki Sulawesi Selatan pada tahun 1942. Pada mulanya kedatangan tentara Jepang disambut baik oleh masyarakat didaerah-daerah Sulawesi Selatan tak terkecuali di Sawitto. Sambutan tersebut dilatar belakangi oleh anggapan masyarakat bahwa Jepang sebagai penyelamat dan pembebas dari Belanda yang telah menajajah beratus ratus tahun. Tahun-tahun pertama pendudukan Jepang di Indonesia khususnya di daerah Sawitto, tentara Jepang terus-menerus melancarkan propaganda bahwa mereka adalah saudara tua yang melindungi saudaranya dari penindasan kulit putih, dengan semboyan yang sangat populer saat itu ialah: "Nippon-Indonesia sama-sama" (Drs. Sarita Pawiloy, 1987: 63).

Addatuang Sawitto yang menjabat ketika masuknya Jepang di Indonesia adalah We

Tenri Arung Rappang. Beliau merupakan ipar dari Andi Mappanyukki selaku *Arung Bone*, sebab Andi Mappanyukki menikah dengan saudara perempuannya yang bernama We Besse Petta I Bulu yang kelak melahirkan Andi Bau Massepe yang kelak menjadi *Datu Suppa*, We Rukiyah Bau Bocco Karaeng Balla Tinggi yang kelak menjadi *Addatuang Sawitto* dan We Pasulle dengan gelar *Datu Bule'e* (Syahrir Kila, 2018). We Tenri Arung Rappang diangkat sebagai *Addatuang Sawitto* menggantikan ibunya yaitu We Beda yang dinyatakan meninggal pada tanggal 28 Juni 1939. (Lontarak Akkarungen Sawitto, 138).

Ketika Jepang berhasil menguasai Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan yang pertama didekati oleh Jepang adalah para raja. Hal tersebut dikarenakan rakyat Sulawesi Selatan teramat setia kepada rajanya. Jepang kemudian berlandung di bawah kewibawaan para raja agar tidak mendapatkan perlawanan dari rakyat.

Pada tahun 1943, Jepang memberi kesempatan kepada orang-orang Indonesia ikut serta berperan dalam melaksanakan pemerintahan. Jepang juga mulai mendudukkan semua raja-raja dari kerajaan besar. Adapun dari kerajaan Sawitto yang ditunjuk oleh Jepang adalah La Tjalo Sulewatang Sawitto sebagai *Cuo Sangiin*. Mereka berusaha untuk mendekati dan menguasai kelompok bangsawan agar dapat menggunakan mereka untuk mempengaruhi bangsawan lainnya dan masyarakat agar mengakui kekuasaannya. Bagi mereka yang bersedia untuk bekerjasama akan diberi kedudukan didalam pemerintahan serta memperluas pengaruhnya, namun bagi mereka yang menentang akan diberi hukuman dan diasingkan.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, terkhusus di Kerajaan Sawitto tidak jauh berbeda pada masa pemerintahan Hindia Belanda dimana *Addatuang* hanya sebuah simbol, sebab yang memegang kekuasaan adalah *Sulewatang*.

Pada masa pendudukan Jepang La Tjalo *Sulewatang Sawitto* sebagai *Cuo Sangiin*. *Sulewatang* pada masa pemerintahan Belanda dijadikan sebagai pengganti kekuasaan *addatuang*. *Sulewatang* diangkat oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan pemerintahan. Jadi, setiap kerajaan yang memiliki *sulewatang* berarti berada di bawah kekuasaan Belanda (Ima Kesuma, 29 Maret 2021). Hal tersebut terjadi di Kerajaan Sawitto.

Kemudian ketika masuknya Jepang ke Indonesia, mereka tidak mengubah sistem pemerintahan yang telah diterapkan pemerintah Hindia Belanda, tetapi hanya penggunaan istilahnya saja yang di ubah menjadi bahasa Jepang.

Raja atau dalam hal ini *Addatuang* tidak memiliki peran dan hanya berfungsi sebagai simbol penguasa Kerajaan Sawitto (Syahrir Kila, 23 Maret 2021). *Addatuang Sawitto* We Tenri hanya sebagai simbol pemerintahan Kerajaan Sawitto, sedangkan yang menjalankan kekuasaan adalah La Tjalo sebagai *Sulewatang Sawitto* atau *Cuo Sangiin* pada masa pendudukan Jepang.

2. Peran dan Fungsi *Addatuang Sawitto* Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada 15 Oktober 1945 diadakan suatu pertemuan oleh para raja-raja di Sulawesi yang terkenal dengan sebutan “*pernyataan Jongaya*”. Adapun raja-raja yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain; Raja Luwu Andi Jemma, Raja Ngalle Raja Gantarang Bulukumba, Andi Sultan Daeng Raja Raja Mandar, Andi Abdullah Majid Raja Balangnipa, Ibu Depu, Andi Makkasau, Arung Galireng dan Andi Bau Massepe. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah ikrar yang menyatakan “Berdiri dibelakang Republik Indonesia, menolak pendaratan NICA dan mendukung Gubernur Ratulangi”. Setelah pertemuan tersebut diadakan lagi pertemuan para raja seafdeeling Pare-pare yang dilaksanakan November 1945. Para raja berembuk hingga tengah malam dan kembali menghasilkan sebuah ikrar “ menyokong Dr.Ratulangi sebagai gubernur Republik Indonesia untuk Sulawesi dan menolak kembalinya Belanda di Indonesia” (Majalah Sarinah no. 50 : 12).

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pengumuman kemerdekaan Indonesia tersebut tidak diakui oleh pihak Belanda, sebab Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigjen Iwan Dongherty mendarat di Makassar pada September 1945. Pendaratan tersebut merupakan bantuan dari tentara kesatuan Australia dengan membonceng tentara NICA (*Nederland Indische Siviel Administratie*) di bawah pimpinan Mayor J. G. Wegner dengan tujuan untuk melucuti tentara Jepang. Namun, kedatangan bangsa Belanda tidak disambut baik oleh bangsa Indonesia. Sehingga terjadilah perlawanan

bangsa Indonesia terhadap Belanda(Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) .

Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh rakyat, karena semakin terdesak pihak Belanda kemudian mengambil kesempatan untuk memanfaatkan para penguasa pribumi atau dalam hal ini para bangsawan. Para bangsawan yang posisinya mulai tergeser kemudian dipulihkan kembali sebagai penguasa daerah setempat atau kembali memulihkan kekuasaan raja dan diberikan hak pemerintahan sendiri demi untuk kepentingan Belanda (Syahrir Kila, 23 Maret 2021). Keberhasilan Belanda membujuk kaum bangsawan ditandai dengan dilaksanakannya konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 15 Juli hingga 25 Juli 1946 yang menghasilkan rancangan pembentukan Negara Indoneisa Timur (Irvan Tasnur, Muhammad Rijal Fadli, 2019: 59).

Pada 1946 pemerintah Belanda melaksanakan konferensi Malino dan Denpasar (Bali) pada 7 hingga 24 Desember 1946 dengan agenda pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT). Tahun 1948 sampai 1949 Belanda mendirikan negara didalam negara Indonesia yaitu Negara Indonesia Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa Belanda berhasil menanamkan kembali pengaruhnya di Indonesia termasuk Kerajaan Sawitto.

Ketika Indonesia merdeka raja-raja di Sulawesi Selatan telah menyatakan sikap bahwa mereka tunduk dan berdiri dibelakang NKRI berdasarkan perjanjian Jongaya pada 15 Oktober 1945. Pada bulan November 1945 diadakan pertemuan para raja seafdeeling Pare-pare di bawah komando Andi Abdullah Bau Massepe selaku Datu Suppa. Dari pertemuan tersebut dihasilkan sebuah pernyataan yang berbunyi “Menyokong Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Republik Indonesia untuk Sulawesi dan menolak kembalinya Belanda di Indonesia”. Pernyataan tersebut kemudian diajukan di forum PBB untuk mendapat pengakuan dari PBB (Majalah Sarinah No. 50, 12).

Disamping Dr. Ratulangi berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari PBB, NICA justru berusaha untuk mengembalikan pemerintahannya di Sulawesi dengan jalan membujuk para raja setempat. NICA berusaha untuk mengembalikan pemerintahannya di Sulawesi secara terang-terangan dengan jalan membujuk para raja-raja disertai dengan janji-janji yang muluk. Beberapa raja yang awalnya menyatakan diri berdiri dibelakang NKRI

kemudian memilih untuk bergabung dengan NICA (H. M. Sanusi Dg. Mattata, 1967: 228).

Diadakan kembali sebuah pertemuan yang bertempat di Bone yang dikenal dengan sebutan Konferensi Raja-raja di Bone pada 1 Desember 1945 di bawah komando Arung Bone Andi Mappanyukki. Dalam konferensi tersebut dilakukan penandatanganan penyerahan kedaulatan kepada NKRI atas kekuasaan kerajaan dan mendukung Dr. Ratulangi serta menolak kedatangan NICA. Pada konferensi tersebut ternyata tidak mencapai kata mufakat, karena ternyata hanya beberapa raja yang menyetujui pernyataan tersebut yaitu Raja Bone Andi Mappanyukki dan Andi Djemma Raja Luwu.

NICA berhasil mengambil hati para raja dengan cara mengembalikan posisi mereka sebagai pemerintah setempat, dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah penandatanganan *Korte Veklaring* 1905 hingga masuknya Jepang ke Indonesia, raja tidak lagi memiliki peran sebagai penguasa setempat dan hanya berfungsi simbol dari suatu kerajaan karena yang memegang kekuasaan adalah para penjajah. Belanda mengembalikan posisi para raja-raja sebenarnya hanya untuk kepentingannya sendiri, untuk menarik simpati rakyat agar rakyat tunduk dan patuh pada pemerintahan Belanda.

Hal demikian juga terjadi di Kerajaan Sawitto, yang awalnya mengatakan berada dibelakang NKRI tetapi ketika masuknya kembali Belanda ke Indonesia khususnya Sulawesi, kerajaan Sawitto justru berpihak kepada Belanda. Selain raja atau *Addatuang Sawitto* dikenal juga istilah *Sulewatang* yang sebenarnya memiliki arti sebagai pengganti *addatuang* dan bertugas untuk menyampaikan keputusan dan kehendak dari *addatuang*, namun setelah masuknya Belanda ke Sawitto *Sulewatang* berubah fungsi menjadi pengganti kekuasaan *addatuang*. *Sulewatang* diangkat oleh pemerintah Belanda dan menjadi pengganti kekuasaan *addatuang*. Di Kerajaan Sawitto pemerintah Belanda mengangkat *Sulewatang* dengan kata lain *Sulewatang* inilah yang menjalankan pemerintahan dan *Addatuang Sawitto* hanya sebagai simbol. Kerajaan yang memiliki *sulewatang* pada masa Belanda, berarti kerajaan tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda, termasuk Kerajaan Sawitto (Ima Kesuma, 29 Maret 2021). Ketika Belanda kembali menguasai Sawitto yang diangkat menjadi *Sulewatang* adalah La Tjalo. Bahkan

Sulewatang La Tjalo yang mewakili Kerajaan Sawitto dalam Konferensi Malino (Akkarungang Sawitto, 140).

3. Peran dan Fungsi *Addatuang Sawitto* Pasca Revolusi Kemerdekaan

Pada tanggal 24 Agustus sampai 3 November 1949, diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan muncullah RIS, sejak saat itu Negara Indonesia Timur melebur masuk kedalam RIS. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 tercapai kata sepakat untuk membubarkan RIS dan kembali menjadi NKRI yang diumumkan keseluruh pelosok tanah air Indonesia pada hari peringatan ulang tahun republik Indonesia ke-5 pada tanggal 17 Agustus 1950.

Ketika Indonesia kembali menjadi NKRI setelah dihapuskannya RIS dan negara-negara bonekanya. Kerajaan Sawitto masih berada di bawah kepemimpinan *Addatuang Sawitto* We Tenri hingga pada tahun 1951 beliau wafat dan dimakamkan di kompleks makan raja-raja Sawitto di Jl. Melati. *Addatuang Sawitto* We Tenri kemudian digantikan oleh kemenakannya (anak dari saudara perempuannya) yang bernama We Rukiyah. We Rukiyah Bau Baco Karaeng Ballatinggi mewarisi tahta di Kerajaan Sawitto. Beliau merupakan anak dari La Mappanyukki Datu Suppa dan Raja Bone dengan isterinya We Besse Petta I Bulu.

Addatuang Sawitto pada saat Indonesia merdeka telah mengatakan berada di belakang NKRI, dengan katalain kerajaan-kerajaan yang mengatakan berada dibelakang NKRI termasuk *Addatuang Sawitto* telah menyerahkan daerah kekuasaanya kepada NKRI. Berdasarkan pernyataan bahwa mereka tunduk terhadap NKRI maka kekuasaan raja hilang sebagai penguasa. Kemudian setelah RIS dibubarkan maka dihapuskan pula pemerintahan kerajaan dan bergabung masuk ke dalam wilayah kekuasaan NKRI.

Pada masa pemerintahan *Addatuang Sawitto* We Rukiyah sistem pemerintahan kerajaan dihapuskan dan daerah Kerajaan Sawitto masuk ke dalam wilayah Daerah Tingkat II Pinrang, wilayah pemerintahan Kerajaan Sawitto mejadi Ibukota Daerah Tingkat II Pinrang. Karena pemerintahan Kerajaan Sawitto dihapuskan maka yang menjadi kepala daerah bukan lagi *Addatuang*

Sawitto, tetapi diangkat seorang kepala daerah yang disebut bupati.

Memasuki tahun 1952 ketika R. Sudiro sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan, dihapuskan yang namanya *afdeeling* dan digantikan menjadi kabupaten. *Onderafdeeling* diganti menjadi kewedanan dan distrik diganti menjadi kecamatan. *Afdeeling* Pare-pare diubah menjadi Kabupaten Pare-pare, asisten residen diubah menjadi bupati atau kepala daerah. Nama pemerintahan di Sawitto dari *zelfbeestur* menjadi *swapradja* Sawitto, kemudian diangkatlah La Makkulawu Cakkuridi Wajo yang merupakan suami *addatuang* (ratu) Sawitto sebagai bupati di Kabupaten Pare-pare.

Kemudian pada tahun 1960 terjadi perubahan besar di Indonesia pada bidang pemerintahan. Dimana Kabupaten Pare-pare diubah menjadi 5 Kabupaten, sehingga Kewedanan Pinrang menjadi Kabupaten Pinrang, maka sejak saat itulah dihapuskan pemerintahan kerajaan. Dihapuskan pula yang namanya *swapradja*, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang tetap dipertahankan untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan *Swapradja Suppa* dijadikan “distrik” dan digabungkan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pinrang. Adapun *Swapradja Mallusetasi* dijadikan “distrik” dan dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Barru. Sehingga wilayah Pare-pare tinggal dari Sungai Sumpangminangae, hingga sungai Karaballo, Lapadde, Bulu Makkedae dan disebut sebagai Kotamadya Pare-pare.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pinrang, maka berakhirilah kekuasaan kerajaan di Sawitto, wilayah pemerintahan Kerajaan Sawitto berubah menjadi kecamatan dan desa yaitu Kecamatan Watang Sawitto dan Desa Watang Sawitto. We Rukiyah kemudian digantikan oleh suaminya sebagai pemimpin di daerah Sawitto khususnya daerah Pinrang, dimana suaminya yang bernama Andi Makkulawu diangkat menjadi Bupati pertama Kabupaten Pinrang.

Setelah pemerintahan kerajaan berakhir dan berubah menjadi pemerintahan daerah yang diangkat menjadi pemimpin atau dalam hal ini bupati pertama yaitu pewaris atau keluarga terdekat dari kerajaan tersebut, maka yang diangkat menjadi Bupati Pinrang adalah suami dari *Addatuang Sawitto* We Rukiyah yaitu Andi Makkulawu (Ima Kesuma, 2021).

Ketika *Addatuang Sawitto* We Rukiyah wafat maka tidak ada lagi yang menggantikan

beliau sebagai *Addatuang Sawitto*, barulah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid bekas bekas kerajaan dan pewarisnya dimunculkan kembali, bukan untuk membentuk pemerintahan sendiri, tetapi diakui sebagai dewan adat dan kekayaan budaya Indonesia (Syahrir Kila, 1997: 121). Barulah putera dari *Addatuang Sawitto* We Rukiyah dan Andi Makkulawu dikukuhkan menjadi *Addatuang Sawitto* yang bernama Andi Bau Sawerigading pada tahun 2015 (Andi Bau Sawerigading).

Kerajaan Sawitto mengalami gelombang pasang surut yang kemudian mengalami peralihan dari kerajaan menjadi Daerah Tingkat II hingga sekarang menjadi Kabupaten Pinrang. Pada saat berstatus daerah tingkat II kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah tingkat II dari 23 daerah tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tahun 1959, tanggal 28 Januari 1959 dan mulai berlaku pada 4 Juli 1959 yang merupakan dasar hukum tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822) (Muh. Arfah; ddk, 1998: 15).

Peralihan Kerajaan Sawitto menjadi Daerah Tingkat II Pinrang berdasarkan UU nomor 29 tahun 1959 yang diberlakukan pada tanggal 04 Juli 1959 merupakan dasar hukum tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan dengan gelar kepala daerahnya adalah bupati. Berdasarkan uu nomor 29 tersebut diatas tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan maka pada Februari 1960 Kerajaan Sawitto resmi menjadi Kabupaten Pinrang. Dimana Bupati Kepala Daerah pertama di Pinrang adalah Andi Makkulawu Cakkuridi Wajo. Dengan demikian jabatan yang tertinggi adalah kepala daerah Pinrang atau bupati, bukan lagi raja atau *Addatuang Sawitto*. *Addatuang Sawitto* sekarang ini sudah tidak memiliki fungsi tetapi berperan sebagai wadah pelestari budaya di Kabupaten Pinrang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Addatuang Sawitto (1942-1960)*” peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Addatuang Sawitto* pada masa sebelum kemerdekaan atau masa pendudukan Jepang tidak memiliki peran dan berfungsi hanya sebagai simbol di Kerajaan Sawitto.

- Addatuang Sawitto* tetap menjalankan pemerintahan adat tetapi diawasi oleh pemerintah pendudukan Jepang, selain itu di angkat pula *Sulewatang* yang menjalankan kekuasaan *Addatuang Sawitto*. Kemudian yang menjalankan pemerintahan pusat adalah pihak pemerintah pendudukan Jepang
2. *Addatuang Sawitto* pada masa revolusi kemerdekaan atau kembalinya NICA/Belanda ke Indonesia. Tidak jauh berbeda pada masa pendudukan Jepang, karena yang diterapkan Jepang adalah sistem pemerintahan era Hindia Belanda. Hanya saja penggunaan nama yang diganti menjadi istilah Jepang. Maka *Addatuang Sawitto* pada masa revolusi Kemerdekaan berfungsi sebagai simbol dan yang menjalankan pemerintahan adalah *Sulawetang* yang diangkat oleh Belanda.
 3. *Addatuang Sawitto* pada masa kembalinya NKRI, kekuasaan kerajaan di hapuskan termasuk Kerajaan Sawitto. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sawitto masuk ke dalam Daerah Tingkat II Pinrang setelah pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. *Addatuang Sawitto* tidak lagi memiliki kekuasaan dalam pemerintahan dan diangkat seorang kepala pemerintahan yang disebut bupati. Dengan dibentuknya Daerah Tingkat II maka berakhirlah kekuasaan Kerajaan Sawitto, *Addatuang Sawitto* tidak lagi memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, tetapi masih tetap diakui sebagai raja. *Addatuang Sawitto* tidak lagi memiliki fungsi tetapi berperan sebagai dewan adat di Kabupaten Pinrang.
- Perjalanan sejarah Kabupaten Pinrang yang panjang mulai dari yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Suppa, Kerajaan Alitta dan Kerajaan Sawitto, dari masa penjajahan, kemerdekaan hingga terbentuk menjadi Kabupaten Pinrang seperti sekarang ini, yang dulunya dipimpin oleh seorang raja hingga dipimpin oleh kepala daerah atau bupati seperti sekarang ini. Maka dari itu hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, tapi digunakan untuk melaksanakan pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang sebagai suatu ilmu.
- DAFTAR RUJUKAN**
- Abduh, Muhammad., dkk. 1985. *Sejarah Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Amir, Muhammad. 2013. *Konfederasi Ajatappareng: Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke-16*. Makassar: De La Macca.
- Amir, Muhammad., Masgaba., & Syahrir Kila. 2019. Konflik dan Relasi Kekuasaan di Ajatappareng 1905-1942. *International Seminar on Conflict and Violence* (pp. 71-19). Makassar: Balai Pelestarian dan Nilai Budaya Sulawesi Selatan.
- Amir, Muhammad., Kila, Syahrir., Hafid, Rosdianah. 2012. *Konflik dan Perubahan Sosial; Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar: De La Macca.
- Arfah, M., Amir, M., Alimuddin, M., Amin, A., Ernawati, A., Rachman, N. A., et al. 1998. *Lasinrang Bakka Lolona Sawitto; Petta Lolo Lasinrang*. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arfah, M., dkk. 1998. *La Sinrang Bakkalolona Sawitto*. Ujung pandag: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1964-1974 vol.1*.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822*. Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bichman Ida. *Majalah Sarinah No. 50*.
- Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kabupaten Pinrang. *Lontarak Akkarungen Sawitto*. Pinrang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
- Edward L, Poelinggomang. 2004. *Perubahan politik dan hubungan kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Hamid, Pananrangi. 1991. *Sejarah Kabupaten Tingkat II Soppeng*. Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- Tasnur, Irvan., & Rijal Fadli, Muhammad. 2019. Republik Indonesia Serikay: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949). *Candrasangkala Vol. 5, No. 2*, 59.

- Kila, Syahrir. 1997. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949 di Kabupaten Pinrang*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- Kila, Syahrir. 1997. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949 di Pinrang*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- Kila, Syahrir. 2018. *Hubungan Kekerabatan Antara Kerajaan Suppa dan Kerajaan Sawitto*.
- Latif, Abd. 2014. *Para Penguasa Ajatappareng*. Yogyakarta: Ombak.
- Mappangara, Suriadi. 2007. *Glosarium Sulawesi Selatan*. Makassar: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisi Tradisional Makassar.
- Mappangara, Suriadi. 2007. *Glosarium Sulawesi Selatan*. Makassar: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisi Tradisional Makassar.
- Mappangara, Suriadi. 2012. *Ensiklopedia Tokoh dan Peristiwa Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mattulada. 1974. Elite di Sulawesi Selatan. *Dalam Bulletin Yaperna No. 2 Tahun I*, (p. 26). Jakarta.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Morris, D. v. 1890. Nota van Toelichting op he Contract Gesloten met het Landschap Suppa, Sawieto en Alitta (Adjataparang) op den 30 Sten Oktober 1890. *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde (TBG) tahun 1893, Jilid XXXVI*. .
- Najamuddin. 2015. Persaingan Elit Bangsawan dengan Kelompok Terdidik pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan. *Volume 10 No.2 Maret 2015* , 2.
- Purnamai, H. L. 2014. *Kerajaan Gowa*. Makassar: Arus Timur.
- Rasyid, Darwis. 1985. *Sejarah kabupaten Daerah Tk. II Pinrang*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Sztompka, P. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.